

STUDI TENTANG JARINGAN SOSIAL DI DALAM SIMPAN PINJAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA MATA AIR KECAMATAN KAUBUN

Nurul Fitriyani¹

Abstrak

Program pemberdayaan masyarakat telah banyak dilaksanakan pemerintah sejak masa orde baru, namun hasil program kurang dirasakan oleh masyarakat. Kegagalan program pemberdayaan masyarakat seperti ini dialami pula oleh program SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) pada PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun, sehingga menarik minat penulis untuk dijadikan tulisan dengan difokuskan kepada jaringan sosialnya.

Kajian jaringan sosial dalam tulisan ini didukung oleh pemikiran Agusyanto yang membagi ke dalam tiga jenis jaringan sosial yakni jaringan sosial interest (kepentingan), sentiment (emosi), dan power (kekuasaan). Tiga jenis jaringan sosial tersebut yang dijadikan sebagai fokus penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan mengenai jaringan sosial di dalam pelaksanaan SPP PNPM di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun. Program pemberdayaan perempuan ini berupa simpan pinjam yang sarasannya diutamakan adalah perempuan dari RTM (Rumah Tangga Miskin). Tujuannya adalah untuk mendukung potensi perempuan dalam mengembangkan usaha atau tani sehingga akan menjadi lebih berdaya dan mandiri setelah diberikannya pinjaman tersebut.

Dari penelitian ini diketahui jaringan sosial yang lebih kuat pada pelaksanaan program pemberdayaan SPP PNPM di Desa Mata Air ialah jaringan kekuasaan, dimana kekuatan pengurus SPP baik tingkat kecamatan maupun desa sangat kuat dalam mengatur jalannya program. Jaringan kekuasaan yang terlalu kuat ini memberikan dampak negatif bagi kelangsungan program tersebut, karena tidak dapat menciptakan rasa kesadaran dan kepedulian baik pada anggota kelompok, pengurus SPP PNPM, maupun aparat desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Jaringan Sosial, PNPM.

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: uldem04@gmail.com

Pendahuluan

Data kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan angka yang tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2012 jumlah masyarakat miskin kota dan desa mencapai 28.594.000 jiwa. Berdasarkan data kemiskinan tersebut maka berdampak pada timbulnya permasalahan yang kompleks, yang tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, politik, dan kekuasaan. Kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat, negara bahkan dunia untuk menanggulunginya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk menjadikan masyarakat berdaya dalam kekuasaan, keterampilan, dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan juga tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya yakni menanamkan nilai budaya modern seperti kerja keras, kemandirian, hemat, keterbukaan dan sikap tanggung jawab (di dalam Ratnawati, 2011: 2). Pemberdayaan tidak hanya ditujukan untuk kaum lelaki, tetapi juga untuk kaum perempuan. Alasan mengapa perempuan perlu dan harus dilakukan pemberdayaan ialah karena pertama, perempuan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi bangsa melalui usaha dalam sektor informal.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan tidak hanya menjadikan masyarakat sejahtera secara ekonomi saja tetapi dapat meningkatkan modal sosial yang baik. Setiap anggota masyarakat sebenarnya memiliki potensi, gagasan, serta kemampuan untuk membawa dirinya menjadi lebih baik, namun terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu, seperti modal, akses, dan jaringan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Untuk mengembangkan potensi yang ada dibutuhkan rangsangan dan gagasan yang menyadarkan akan peran dan posisinya dalam pembangunan. Rangsangan dan gagasan dapat diartikan sebagai dorongan yang dilakukan kepada masyarakat sasaran untuk menentukan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga menjadi mandiri dan partisipatif.

Program pemberdayaan perempuan dengan berbasis jaringan sosial pernah berhasil dilakukan di Bangladesh dengan sistem *Grameen Bank* oleh Muhammad Yunus (peraih penghargaan *Nobel Foundation* tahun 2006). *Grameen* sendiri berasal dari bahasa Bangla yaitu *grameen* berarti “desa” atau “pedesaan”. Konsep *Grameen Bank* ini banyak menginspirasi banyak orang dengan sistem pemberian kredit ringan pada kaum miskin yang tergabung dalam kelompok kecil 5-10 orang dengan sistem pinjaman tanpa anggunan atau jaminan. Mengadopsi sistem kerja *Grameen Bank* milik M. Yunus, pada tahun 2007 Indonesia menciptakan formulasi program pemberdayaan masyarakat yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM menempatkan perempuan pada posisi istimewa yang berbeda dengan program pemerintah lainnya guna mendukung kesetaraan gender,

yakni program Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan atau yang biasa disingkat SPP.

Pada tahun 2009, di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur mendapatkan kesempatan bergabung dalam program SPP ini termasuk Desa Mata Air tempat peneliti melakukan penelitian. Dari hasil observasi penulis, desa Mata Air mengalami 2 kali kegagalan dalam penggunaan dana pinjaman SPP, pertama di tahun 2010 karena pada tahun 2009 program air bersih yang diprioritaskan ternyata mengalami kegagalan sehingga menyebabkan tidak bisa mendapatkan pinjaman di tahun 2010, kemudian tahun 2013 pengembalian dana yang tidak tepat waktu dan *nunggak* sehingga tahun 2014 desa ini tidak mendapatkan pinjaman lagi.

Melihat fakta di atas, penulis berasumsi bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga program yang disinyalir dapat membantu masyarakat khususnya perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga ini tidak berhasil dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan di desa Mata Air.

Kerangka Dasar Teori

Jaringan Sosial (*Social Network*)

Menurut Agusyanto (2007:13) jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus dimana 'ikatan' yang menghubungkan satu titik ke titik lain di dalamnya ialah hubungan sosial. Dalam hal ini, hubungan sosial diikat oleh adanya unsur kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan oleh adanya norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan sosial terdapat unsur kerja yang melalui hubungan sosial yakni kerja sama.

Menurut Fukuyama, 2002:38 (di dalam Hardiyanti, 2013:19) lebih menekankan pada efektifitas kerjasama atas tim dengan kepercayaan tinggi (*high trust*). Jika orang-orang bekerja beres dalam sebuah perusahaan misalnya, dengan kepercayaan yang tinggi dengan menjunjung norma etis bersama, maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya dengan berinovasi secara organisasional karena memungkinkan munculnya varietas hubungan sosial yang lebih luas. Sementara itu, hubungan sosial menurut Van Zanden (di dalam Agusyanto, 2007:14) merupakan interaksi yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang akhirnya diantara mereka terkait satu sama lain dengan atau oleh seperangkat harapan yang relatif stabil.

Menurut Lawang, 2005 (di dalam Nurina, 2012: 16) pada dasarnya, jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Ininya, konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Agusyanto (2007:34-38), ditinjau dari hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis jaringan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Jaringan *interest* (kepentingan), adalah hubungan sosial yang terbentuk dan bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan ini terbentuk atas dasar hubungan sosial, sementara, dan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan yang diinginkan
2. Jaringan *sentiment* (jaringan emosi), dimana jaringan yang terbentuk atas dasar hubungan sosial yang bermuatan emosi. Pada jaringan emosi terbentuk atas hubungan-hubungan sosial, dimana hubungan sosial itu sendiri menjadi tujuan tindakan sosial misalnya dalam pertemanan, percintaan atau hubungan kerabat dan sejenisnya.
3. Jaringan *power* (jaringan kekuasaan), dimana hubungan sosial yang terbentuk bermuatan kekuasaan. Pada jaringan *power*, konfigurasi-konfigurasi saling keterhubungan antar pelaku didalamnya disengaja atau diatur. Tipe jaringan sosial ini muncul bila pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan membutuhkan tindakan kolektif dan konfigurasi saling keterhubungan antar pelaku biasanya dibuat permanen.

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar “daya” atau *power* yang berarti kekuatan, kemampuan atau kekuasaan. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju berdaya (di dalam Sulistiyani, 2004: 77). Lebih jauh lagi mengenai “proses” dapat diartikan bahwa pemberdayaan itu melalui serangkaian langkah tindakan nyata untuk merubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku dan keterampilan yang baik.

Sedangkan menurut Jim Ife (2002), pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan dan masyarakatnya (di dalam Zubaedi, 2013:74).

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki konsep. Menurut Winarni (1998: 75) konsep pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi dan daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pendapat ini bahwa pemberdayaan juga tidak hanya ditujukan kepada yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi dapat diberikan kepada yang memiliki daya namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian.

Definisi Konsepsional

- a. Jaringan sosial adalah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang memiliki ikatan saling berhubungan antara pelaku program SPP PNPM satu dengan lainnya yang membentuk adanya hubungan sosial .

- b. Pemberdayaan perempuan adalah proses membuat perempuan desa Mata Air menjadi berdaya dari keterbatasan dan ketidakmampuan dalam mengakses kebutuhan hidup agar menjadi mandiri melalui program pemberdayaan.
- c. Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan (SPP) adalah sebuah program pemberdayaan kepada kelompok perempuan desa Mata Air melalui pemberian pinjaman sebagai modal usaha yang tujuannya untuk menjadikan perempuan lebih mandiri secara finansial

Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan mengenai jaringan sosial di dalam pelaksanaan SPP PNPM di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun. Informasi yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan informan yang dipilih dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Informan yang penulis wawancara sebanyak 12 orang yakni 7 orang anggota pemanfaat program, 2 ketua kelompok, 2 aparat desa, dan UPK.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Jumlah penduduk Desa Mata Air pada tahun 2013 berjumlah 638 jiwa. Desa ini merupakan daerah transmigrasi sehingga memiliki beragam suku dan agama. Suku yang ada di desa ini diantaranya Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan beberapa orang merupakan pendatang baru seperti suku Bugis dan Kutai. Agama yang mendominasi ialah Islam kemudian Hindu.

Gambaran Umum Pengurus dan Kelompok SPP PNPM di Desa Mata Air

Program SPP PNPM di Desa Mata Air dimulai pada tahun 2009. Pada masa itu hanya ada satu kelompok yang mendapatkan pinjaman reguler yakni kelompok Sariwangi sebanyak 15 orang dengan besaran pinjaman satu juta rupiah. Masing-masing anggota mendapatkan potongan administrasi sebesar 150 ribu rupiah, sehingga uang yang diterima sebesar 850 ribu rupiah.

Pada tahun 2010, Desa Mata Air tidak dapat melakukan pinjaman selanjutnya dikarenakan program PNPM lainnya yakni program air bersih yang gagal. Selama setahun Desa Mata Air tidak mendapat bantuan dari PNPM sebagai bentuk sanksi. Tahun berikutnya, 2011, Desa Mata Air kembali mengajukan pinjaman untuk kelompok perempuan lainnya yakni kelompok Pokja I yang diketuai oleh M. Pinjaman ini merupakan pinjaman reguler sebesar 3 juta rupiah dengan jumlah anggota 15 orang

Tahun 2012, Desa Mata Air mendapatkan lagi pinjaman reguler untuk kelompok Pokja II dan perguliran untuk kelompok Sarwangi. Kelompok Pokja II beranggotakan 17 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 3 juta rupiah, begitupun untuk kelompok perguliran Sarwangi mendapatkan pinjaman sebesar 3 juta rupiah

dengan jumlah anggota 18 orang. Kelompok Sariwangi sudah bisa mengembangkan kelompoknya dengan meningkatkan jumlah pinjaman.

Aktor yang paling dominan di dalam pelaksanaan program SPP ialah yakni ketua kelompok dalam memberikan informasi kepada anggota kelompoknya, mengurus proposal permohonan, hingga mengambil uang pinjaman dan penyetoran ke kantor UPK.

Jaringan Sosial pada Program SPP PNPM di Desa Mata Air

Program SPP juga merupakan program untuk membantu permodalan kaum perempuan dalam membangun usaha. Sebelum diberikan pinjaman, kelompok harus membuat proposal permohonan yang di dalamnya berisikan usulan-usulan kegiatan kelompok yang kemudian akan diverifikasi oleh tim ahli yang kemudian menghasilkan usulan prioritas.

Informan S menjelaskan bahwa program SPP terdiri dari 2 jenis pinjaman yakni program reguler dan perguliran. Program reguler ialah pinjaman tahap awal yang jumlahnya 1 dan 3 juta kemudian dari pinjaman ini berkembang menjadi pinjaman perguliran. Pinjaman perguliran sendiri diberikan jika seluruh kelompok dalam 1 desa telah lunas pinjaman reguler beserta bunganya, sehingga jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar lagi.

Pengetahuan umum mengenai program SPP PNPM anggota pemanfaat sangatlah rendah. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepedulian anggota kelompok pemanfaat dalam pelaksanaan program. Penggunaan pinjaman yang semestinya digunakan untuk mendukung permodalan usaha, digunakan oleh anggota sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi. Misalnya informan KR, anggota dari kelompok Sariwangi menyatakan bahwa pinjaman yang KR dapat dibagi lagi menjadi dua dengan keluarganya dan digunakan sebagai uang muka kendaraan.

Di dalam pelaksanaannya ada tumpang tindih jabatan pengurus, seperti ES yang menjabat sebagai TPU (Tim Penulis Umum) dan ketua kelompok IIA, IIB, serta III. Informan S menyatakan bahwa ES yang terlalu banyak mendapatkan jabatan menyebabkan kebingungan pembukuan dan pelaporannya. Hal ini juga menyebabkan rentan penyalahgunaan dana yang ada. Menurut informan S, pinjaman yang belum dikembalikan adalah sebesar kurang lebih 60 jutaan.

Permasalahan pada pelaksanaan program SPP PNPM ini disebabkan pula oleh kurang maksimalnya tahapan-tahapan pelaksanaan program SPP diantaranya sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan monitoring, serta evaluasi program. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pengurus SPP PNPM di Desa Mata Air belum maksimal. Beberapa informan yang penulis wawancarai menyatakan bahwa pertemuan dengan pengurus hanya terjadi beberapa kali saja ketika proses sosialisasi awal berjalan. Sehingga tidak heran jika anggota kelompok perempuan pemanfaat pinjaman tidak mengenal pengurus program, bahkan ada beberapa orang yang tidak mengetahui berada pada kelompok apa. Pendekatan sebelum program berjalan yang dilakukan pengurus pun tidak secara partisipatif sehingga

tidak diketahui apa yang menjadi kebutuhan perempuan di desa Mata Air dan juga tidak terjalin kedekatan hubungan secara emosional dengan kelompok perempuan penerima pinjaman.

Hubungan sosial anatar anggota dalam bermasyarakat sangatlah dekat akan tetapi di dalam pelaksanaan SPP ada kecenderungan enggan membantu dan peduli satu sama lain. Hal ini terjadi karena menyangkut masalah uang sehingga sangat sensitif untuk terlibat jauh di dalamnya. Beberapa informan yang penulis wawancarai secara tersirat menggambarkan bahwa timbul kurangnya kepercayaan mereka terhadap ketua dan pengurus, baik pengurus di lingkup desa maupun kecamatan. Terlebih lagi aparat desa yang terkesan mengenyampingkan masalah ini sehingga anggota kelompok beranggapan bahwa ada hal yang ditutup-tutupi, namun anggota kelompok tidak bisa berbuat banyak karena merasa tidak memiliki kuasa. Rendahnya kepercayaan tersebut mengakibatkan gagalnya sistem pinjaman tanggung renteng yang dicanangkan oleh PNPM guna meningkatkan kerjasama antar anggota pemanfaat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pinjaman SPP hingga tahun 2015 belum terselesaikan. Banyak hal yang penulis temukan sebagai kekurangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan PNPM ini. Beberapa hal yang penting di dalam pelaksanaan program ini tidak berjalan dengan maksimal, seperti mekanisme pelaksanaan program, dan hubungan sosial yang terjalin antar pemanfaat pinjaman, pengurus, serta aparat desa yang kurang baik. Hilangnya kepercayaan, kepedulian yang rendah, dan tidak ada kerjasama di dalam mendukung pelaksanaan program disebabkan oleh gagalnya proses pemberdayaan yang dilakukan. Kekecewaan yang muncul sebab baik ketua kelompok maupun pengurus SPP tidak transparan mengurus keuangan yang hingga kini belum selesai.

Padahal mekanisme pelaksanaan program SPP ini terdapat dalam PTO yang di dalamnya mengatur mengenai hal yang harus dilakukan, seperti pelaksanaan sosialisasi yang perlu dilakukan sesering mungkin hingga anggota pemanfaat mengerti betul mengenai program SPP ini. Sosialisasi yang tidak maksimal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan anggota mengenai program. Hampir semua informan yang merupakan pemanfaat pinjaman tidak mengetahui mengenai program SPP. Selain itu, berdampak pula pada hubungan tidak harmonis antara pengurus dan anggota pemanfaat pinjaman dan bahkan sampai tidak mengenal pengurus SPP baik desa maupun kecamatan.

Jaringan yang lebih kuat terjadi pada program SPP PNPM di Desa Mata Air yaitu jaringan kekuasaan. Unsur kekuasaan terlihat dari bagaimana pengurus SPP cenderung tidak memperhatikan bagaimana proses pemberdayaan kaum perempuan di desa Mata Air. Jaringan sosial tipe ini menyebabkan rendahnya kesadaran para pelaku SPP PNPM akan pentingnya program tersebut dalam memberdayakan kaum perempuan di Desa Mata Air, terutama rendahnya

kesadaran pada anggota pemanfaat dan pengurus sehingga menyebabkan tunggakan yang hingga tahun 2015 belum terselesaikan.

Jaringan sosial lainnya yang cukup kuat adalah jaringan kepentingan. Dimana jaringan kepentingan terbentuk karena ada tujuan tertentu dan sifatnya berubah-ubah, dan akan berhenti jika tujuan itu telah tercapai. Unsur kepentingan nampak pada keputusan ES dalam menempatkan dirinya menjadi ketua dari tiga kelompok dan UPK. Unsur kepentingannya berdasarkan faktor materi yakni uang, sebab menduduki jabatan sebagai ketua kelompok akan mendapatkan bagian dari pinjaman yang diperoleh anggota kelompok sebesar 150.000 perorang sebagai pengganti biaya transportasi dan pengurusan administrasi/proposal pengajuan. Kemudian sebagai ketua TPU juga akan mendapatkan honor dari jabatan tersebut.

Sedangkan jaringan emosi nampak lemah, padahal jaringan emosi merupakan yang akan membawa kedalam hubungan yang lebih mantap dan permanen dengan hubungan sosial yang lebih baik antar satu dengan yang lainnya. Jaringan emosi menurut Agusyanto, akan muncul saling kontrol yang relatif kuat antar pelaku program pemberdayaan dan meningkatkan rasa solidaritas yang akan mengurangi kepentingan pribadinya. Hubungan yang terbina juga akan semakin berkualitas dengan rasa percaya yang tinggi sehingga kerjasama antar fasilitator dan masyarakat akan terlaksana dengan baik.

Kemudian pendekatan secara partisipatif fasilitator kepada kelompok sasaran pemberdayaan menimbulkan dampak yang baik yakni dapat mengetahui dengan pasti potensi dan kebutuhan masyarakat tersebut. Potensi masyarakat perlu digali lebih dalam lagi dengan pengkajian kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diprediksi dari luar melainkan dari masyarakat itu sendiri.

Jaringan emosi yang kuat hanya terlihat kuat pada kelompok Sariwangi yang bersifat homogen (seagama dan sesuku) dimana anggota kelompoknya tidak hanya terikat dalam suatu hubungan kekerabatan melainkan pula terlihat dari keakraban, pemberian informasi yang cepat, saling mengingatkan, kontrol ketua kuat dalam kelompok, dan saling membantu jika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa mengembalikan pinjaman SPP. Wilayah tempat tinggal dan tempat kerja yang berdampingan sangat membantu proses pemberdayaan SPP PNPM ini.

Kesimpulan

Diantara ketiga jaringan sosial seperti jaringan kekuasaan, kepentingan dan emosi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan kedua jaringan sosial lainnya. Dominasi jaringan kekuasaan menyebabkan rendahnya kesadaran dari pelaku program SPP PNPM di Desa Mata Air (anggota pemanfaat, aparat desa pengurus SPP PNPM) dalam melakukan setiap kewajiban menjaga program ini agar tetap berlangsung. Jaringan sosial lain yang nampak cukup kuat adalah jaringan kepentingan, dimana unsur kepentingan selalu ada di dalam kekuasaan.

Rendahnya jaringan emosi yang terbentuk untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan mengakibatkan rendahnya hubungan sosial, kepercayaan, kepedulian, kontrol, dan kerjasama yang terjalin antar pelaku program SPP PNPM di Desa Mata Air. Rendahnya hubungan sosial, kepercayaan, kepedulian, kontrol dan kerjasama menyebabkan kegagalan program simpan pinjam yang semestinya dapat mengembangkan potensi simpan pinjam dan membantu permodalan usaha mereka.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kelompok SPP terdiri dari beragam suku dan agama. Kondisi ini menjadikan status kelompok mengarah kepada sifat heterogen sehingga kurang menciptakan kepercayaan (*trust*) yang tinggi. Kepercayaan yang rendah menyebabkan mekanisme pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terutama pada tahap sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan monitoring program sehingga menyebabkan pula ketidakharmonisan kerja sama diantara pelaku program SPP PNPM.

Daftar Pustaka

Buku

- Agusyanto, Ruddy. 2007. *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Adita Media
- Yunus, Muhammad. 2008. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Dokumen

- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*. Jakarta

Karya Ilmiah

- Hadiyanti, Octa. 2013. *Analisis Pemanfaatan Jaringan Sosial Center for Orangutan Protection (COP) di Kalimantan dalam Upaya Penyelamatan Orangutan*. Unmul Samarinda. Skripsi

Internet

Nurina. 2012. *Penggunaan Jaringan Sosial dan Modal Sosial dalam Bisnis Berbasis Etnis: Sebuah Studi Sosiologis Ekonomi Pedagang Fashion Etnis Tionghoa di Pusat Grosir Metro Tanah Abang dengan Menggunakan Soft Systems Methodolgy*. UI Depok. Skripsi (Online) (lib.ui.ac.id) diakses 15 Oktober 2014